



**AMANAT MENTERI DALAM NEGERI
PADA
PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE XIX
Tanggal 27 April 2015**

**Yth. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air
Yth. Para peserta upacara sekalian.**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelenggarakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX tahun 2015, dengan tema "Menghadirkan Pemerintahan daerah yang Demokratis dan Melayani Masyarakat dalam Mendorong Terbentuknya Daya Saing, Kreatifitas dan Inovasi dengan Mengandalkan Kekhasan Daerah Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat."

Seiring dengan tema tersebut saya ingin mengajak segenap Pemerintahan daerah untuk merapatkan barisan dan bahu membahu menampilkan kinerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam menggapai kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saudara-Saudara yang Berbahagia,

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Momentum regionalisasi yang ditandai dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan peluang bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing, dimana otonomi daerah menjadi faktor penguat bagi setiap daerah khususnya dalam mendorong keluarnya arus barang dan jasa dari daerah untuk bersaing di kancah regional Asia Tenggara. Disamping itu, meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah pada gilirannya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kerukunan antar suku dan agama, serta meminimalisir berbagai pengaruh-pengaruh dari dalam dan luar negeri yang memunculkan tindakan-tindakan radikalisme serta mengancam keamanan nasional, regional dan global.

Kebijakan otonomi daerah kedepan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan. Di tengah-tengah

kemajemukan di tingkat lokal, regional, dan nasional, otonomi daerah dituntut untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Otonomi daerah dituntut pula untuk mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah yang merefleksikan perlunya kesiapan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang pada 15-20 tahun mendatang menghadapi bonus demografi.

Otonomi daerah juga ditantang untuk dapat mengelola daerah-daerah otonom baru baik provinsi, kabupaten dan kota. Saat ini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Jumlah yang masif ini di satu sisi memerlukan berbagai pengaturan yang bersifat generik untuk menjamin sinergitas perencanaan dan pembangunan secara nasional, di sisi lain, karakteristik setiap daerah, tetap diakomodir termasuk bagi daerah yang bersifat khusus maupun istimewa. Sinergitas perencanaan dan pembangunan di tingkat lokal dan nasional akan menjamin upaya kita mewujudkan berbagai program jangka menengah dan jangka panjang termasuk dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Saudara-Saudara sekalian,

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dan menegaskan lagi kepada kita Visi misi Nawa Cita Presiden RI yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Diselaraskan dengan tema Hari Otonomi Daerah XIX Tahun 2015, dapat ditemukeni berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam upaya mem perkuat kebijakan otonomi daerah yaitu:

1. Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan eksistensi kelembagaan daerah yang diisi oleh SDM aparatur profesional. Berbagai lembaga daerah baik berupa dinas, kantor, dan badan harus menyelenggarakan fungsi-fungsi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Struktur organisasi pada kelembagaan daerah harus menganut prinsip tepat ukuran (*right sizing*), sinergis dan dapat merespon cepat kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, SDM aparatur daerah dituntut proaktif dalam menyikapi berbagai dinamika kehidupan masyarakat, memiliki kompetensi dan kapasitas yang tinggi, serta selalu mempelajari perkembangan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Kualitas pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengembangan kapasitas daerah baik dalam hal regulasi, sistem dan sumber-sumber pendanaan di daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi dengan tepat kapasitas yang dimilikinya untuk dapat menghasilkan berbagai kemajuan-kemajuan yang diharapkan.

3. Keberagaman masyarakat merupakan suatu fakta yang menjadi acuan para pendiri bangsa. Keberagaman masyarakat harus dapat direfleksikan dengan penyediaan berbagai kebijakan daerah yang menjamin hak-hak hidup serta dapat menumbuhkan berbagai kreasi dan inovasi untuk kemajuan daerah.
4. Keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu tantangan di negara yang terdiri dari puluhan ribu kepulauan dengan perbedaan kualitas infrastruktur antara satu daerah dengan lainnya. Untuk itu, perhatian terhadap penataan daerah difokuskan pada daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik agar dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru serta ketersediaan pelayanan dengan tetap memperhatikan skala ekonomis dalam pelaksanaannya.
5. Otonomi daerah mendorong munculnya para pemimpin daerah yang kapabel dan akseptabel melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk juga untuk mendapatkan pemimpin daerah yang peduli serta dapat merespon cepat terhadap berbagai permasalahan masyarakatnya. Demikian pula eksistensi DPRD harus diperkuat untuk menjamin check and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Selanjutnya bagi daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di tahun 2015, kami meminta kepada Saudara-

saudara untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya terkait dengan penyediaan pendanaan, keamanan, ketertiban dan netralitas PNS sehingga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak dapat berjalan secara demokratis, lancar, tertib dan aman.

Saudara-Saudara yang berbahagia,

Akhir kata, semoga dengan semangat Hari Otonomi Daerah ke XIX dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit dalam mengembangkannya dimasa yang akan datang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Selamat Hari Otonomi Daerah, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkahi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bangkit dan maju".

Terimakasih

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO